

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Komite Nasional Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Senduru Di Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Fadjar, A. Mukhtie, *Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum*, Intrans Publishing, Malang, 2018.

Soepiadhy, Soetanto, *Meredesain Konstitusi*, Penerbit Kepel Press, Jakarta, 2004.

Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2010

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-13, Kencana Media Group, Jakarta, 2017.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Abas, Nala Syifa, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahmag Wahid Pekalongan, 2024.

Alfath, Tahegga P., *Prinsip Kenusantaraaan Dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Secara Nasional*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2024.

Herdiansyah, Moch. David *Kekuatan Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Narotama, 2024.

Ilham, Muhammad, *Ketentuan Ambang Batas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Masalah*, Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, 2023.

Natsir, Moch. Nazri, *Pengaruh Pergeseran Ambang Batas Dari Syarat Formil Menjadi Syarat Materiil Terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022.

Pratama, Yovie Agustian, *Penerapan Ketentuan Ambang Batas Suara Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2024.

Jurnal

- Abadi, Songga Aurora. 2022. "Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 2(1)
- Anwar, Aris. 2008. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/Puu-V/2007 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah." (3) <http://repository.unmuhjember.ac.id/17420/>.
- Aprilianti, Diana Dwi, Muhammad Mashuri, and Humiati Humiati. 2024. "Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6(1)
- Chakim, M. Lutfi. 2014. "*Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi.*" *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3(1).
- Darmawan, Darmawan, and M. Fajrul Falah. 2022. "*Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.*" *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4(2).
- Dedi, Agus. 2021. "*Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi Di Indonesia.*" *Jurnal moderat* 7(1).
- Desmon, Andi. 2018. "Pembukaan Undang-Undang Dasar." *Jurnal Cendikia Hukum* (26)
- Ginting, Br. Sryani. 2017. "Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok." *Jurnal Law Pro Justitia* II(2). <https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwJXVGsQQRGxmtCLPGGbzJvfbKj?projector=1&messagePartId=0.1>.
- Hamdi, Muh. Rizal, Idul Adnan, Syarifuddin Syarifuddin, and Hamroni Hamroni. 2022. "*Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.*" *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 2(2).
- Hadi, Syofyan. 2023. "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19(4).
- Hapsari, Yasinta Dyah Paramitha, and Retno Saraswati. 2023. "Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5(1).
- Haryono, Dodi. 2022. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 18(4).
- Hasibuan, H.A. Lawali, and Alvin Hamzah Nst. 2023. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* 15.

- Hasibuan, Sd.fuji lestari, and Yonna Wati. 2020. "Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 1(1).
- Haxhiu, Sadik, and Avni H Alidemaj. 2021. "Representative Democracy-Its Meaning and Basic Principles." *Acta Universitatis Danubius* 17(2).
- Irawan, Anang Dony. 2019. "Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3(2).
- Junaidi, Wulan Novianti, Universitas Islam, Negeri K H Abdurrahman, and Wahid Pekalongan. 2023. "Penafsiran Hukum Futuristik Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Manabia : Journal of Consitutional Law."
- Jurnal, Jicn, Cendikiawan Nusantara, and Hasim Hartono. 2024. "Urgensi Putusan MK Nomor 60 / PUU-XXII / 2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 The Urgency Of Mk Ruling Number 60 / PUU-XXII / 2024 Regarding The Organization Of The 2024 Election." (September).
- Kaban, Divany Harbina Emzilena, Keshia Annisa Putri, Arif Pujawangsa Paksi, and Irwan Triadi. 2024. "*Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.*" *Media Hukum Indonesia* 2(3).
- Kartini, Kartini et al. 2023. "*Pendekatan Historis Dan Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam.*" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2(03).
- Khalid, Afif. 2014. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6(11).
- Lailam, Tanto. 2014. "Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang- Undang Terhadap Undang-." *Jurnal Media Hukum* 21(1).
- M. Manullang, E. Fernando. 2019. "Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis." *Veritas et Justitia* 5(2).
- Mappasiling, Andi Ahmad, and Supriyadi Supriyadi. 2021. "Implikasi Yuridis Terhadap Calon Independen Dalam Pilkada Menurut Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah." *MLJ Merdeka Law Journal* 2(1).
- Muhamad Afied Hambali. 2014. "*Pemilukada Pasca Reformasi Di Indonesia.*" *Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA* 8(1).
- Muwahid. 2017. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim." *Al-Hukama'* 7(1).
- Firdaus Arifin. 2024. "Analisis Kritis Terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik" 25(2).
- Rananda, Muhammad Jeffry. 2016. "Politik Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota." *FIAT JUSTISIA:Jurnal*

Ilmu Hukum 9(4).

- Sadeadema, Valentina. 2017. "Transparansi Informasi Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum." *Jurnal Transformative* 3.
- Saraswati, Retno. 2011. "Calon Perseorangan : Pergeseran Paradigma Kekuasaan Dalam Pemilukada." *Masalah-Masalah Hukum* 40(2).
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10470>.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. 2019. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16(3).
- Sinaga, Parbuntian. 2018. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945." *Binamulia Hukum* 7(1).
- Suminta kaka. 2019. "'Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau' Sekretaris Jenderal Kipp Indonesia." 3:.
- Suhadiyanto, Andi, and Puji Lestari. 2008. "*Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008.*" *Forum Ilmu Sosial* 35(2).
- Suyatno, Suyatno. 2016. "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1(2).
- Sodikin. 2021. "Konsep Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Dikaitkan Dengan Ajaran Kedaulatan Rakyat." : 34.
- Ulum, Muhammad Bahrul. 2021. "Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan Dan Perubahan." *Undang: Jurnal Hukum* 4(2).
- Umami, K. 2023. "Implementasi UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (3) Tentang Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah." ... *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 13(1).
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/502%0Ahttps://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/download/502/270>.
- Wahyu Hindiawati. 2024. "Pengaturan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Yang Efektif Pasca Perubahan Uud 1945 Sebagai Wujud Negara Hukum." *Governance, Social-political*, 4(1).
- Warjiyati, Sri. 2014. "Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4(01).
- Zulfikar, M. Adnan Yazar. 2013. "Politik Hukum Dalam Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi, Menuju Juristocracy." *Padjajaran Law Review I* 1(1).

Media Elektronik

Efraim Jordi Katanya, *Mengenal Penafsiran Konstitusi dan Contohnya*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penafsiran-konstitusi-lt63036436952ae/>

Farah Khalisah, *Calon Independen: Mampu atau Tidak*, Diakses Pada
<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/2457-2/>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Dianggap Tidak Memenuhi Syarat, Perppu Pilkada Langsung Digugat*,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10378>

Willa Wahyuni, *Mengenal Parliamentary Threshold Dan Ketentuan Terbaru*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-parliamentary-threshold-dan-ketentuan-terbaru-lt65e59c60c442f/>

Utami Argawati, *Ambang Batas Parlemen Untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian*,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=19790&menu=2>

